

343.04
Ari
2 C1

**ASPEK-ASPEK YURIDIS FISCAL YAYASAN
DAN PROBLEMATIKANYA**

(Suatu Studi tentang Kepatuhan Yayasan dalam Membayar Pajak di Semarang Barat)



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Disusun oleh :

Ahmad Ariyadi, SPd, SH.

B4B 001095

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2003

LEMBAR PENGESAHAN

ASPEK-ASPEK YURIDIS FISCAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA

(Suatu Studi tentang Kepatuhan Yayasan dalam Membayar Pajak di Semarang Barat)

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada tanggal : 31 Desember 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

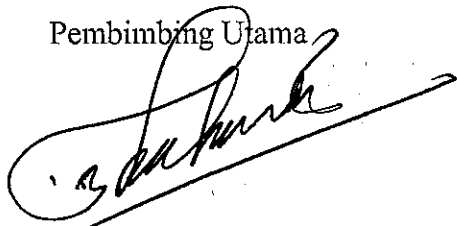
Oleh :

Ahmad Ariyadi, S.Pd. SH.

B4B 001095

Telah disetujui oleh

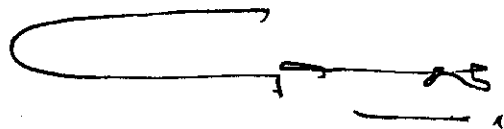
Pembimbing Utama



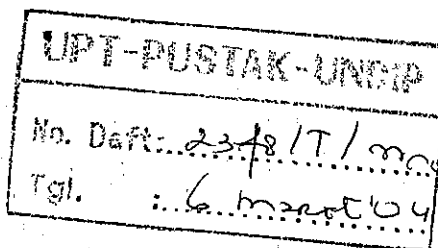
Noor Rahardjo, SH. M.Hum.
NIP. 130 675 153

Ketua Program

Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130 359 063



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum dengan adil (QS. An-Nisa : 59).
- Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sesudah memberikannya pada mereka, tetapi Allah akan mencabut ilmu dari mereka bersamaan dengan dicabutnya para Ulama ilmunya. Maka tetaplah manusia dengan kebodohan, Ulama itu dimintai fatwa lalu berfatwa dengan pendapatnya, maka menyebabkan dan menjadi sesatlah mereka (H.R. Bukhari).
- Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna (H.A. Mukti Ali).

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak (Alm) dan Ibu tercinta
2. Kakak-kakakku tercinta
3. Masyarakat Desa Sidokumpul

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diterbitkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya yang telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 31 Desember 2003

Penulis

ABSTRAKSI

ASPEK YURIDIS FISCAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA

Oleh

Ahmad Ariyadi, S.Pd. SH.

Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan telah memberikan landasan hukum bagi kehidupan Yayasan di Indonesia.

Di masa lalu pendirian Yayasan hanya berdasarkan pada kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi, yang pengelolaannya secara komunikasional atau tradisional, sekarang di dalam era reformasi sudah tidak lagi, yaitu Yayasan dikeola secara konvensional, keterbukaan dan akuntabilitas agar dapat berkembang dengan sehat dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Sehubungan aspek perpajakan bagi Yayasan, selama ini timbul berbagai kesalahpahaman. Sebagai organisasi nirlaba yaitu bahwa Yayasan tidak membagikan laba atau keuntungan yang diperolehnya baik dalam bentuk deviden, bagian laba dan sejenisnya. Maka timbul berbagai anggapan bahwa Yayasan bebas pajak karena tujuan Yayasan adalah dalam bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan, yang semata-mata untuk kepentingan umum / kepentingan sosial.

Berdasarkan peraturaturan perundang-undangan perpajakan yang ada tidak demikian adanya. Yayasan sebagai badan hukum merupakan subyek pajak. Dan sebagai subjek pajak maka Yayasan dikenai pajak-pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku.

Dengan diberlakukannya perpajakan bagi Yayasan, maka Yayasan tidak lagi ada alasan untuk tidak membayar pajak negara. Yayasan harus membayar pajak-pajaknya untuk negara guna keperluan pembangunan. Meskipun demikian dalam hal-hal tersebut ada beberapa kebijakan yang berupa kelonggaran-kelonggaran tertentu dalam hal membayar pajak-pajaknya. Hal ini terkait dengan kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

ABSTRACT

FOUNDATION ASPECT JURIDICAL FISCAL AND ITS PROBLEM

(Case study obedience of foundation would be to pay a tax in Semarang Barat)

By

Ahmad Ariyadi, S.Pd. SH.

Regulations No. 16, 2001th, about foundation which was enacted in 2001 is intended to give the true comprehension for hum about the foundation, to guarantee the certainty or law and order in and to restore the function of foundation as or legal institution. In order to get the aims in social, religion and humanism. The regulation of foundation has set a legal basic for the existence of foundation in Indonesia.

In the previous, foundation was established base on custom and jurisprudence. They had held and was managed communication system and traditionally. In reformation era the foundation is managed fairly, professionally and accountability. It means, they hope to grow up maximize.

Up to now, a miss understanding, had been related to the fiscal aspect of foundation. As a not profit organization foundation does not provide an advantage / profit / benefit as a dividend or other. The assume come up the foundation does not have to pay fiscal cause of. Its activities in social, religion, humanity field. Base on the Indonesia ordinance of foundation. Foundation as a legal subject has to pay tax.

According the regulations of foundation fiscal, there were no reasons that foundation did not pay the tax. They have to pay the foundation tax to build a nation whenever. There were some policy that was made by government cause of the functions of social aspect, religion aspect and humanism aspect.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini yang berjudul "ASPEK-ASPEK YURIDIS FISCAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA" sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih ada kekurangannya. Namun demikian dengan ketekunan, tekad dan semangat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan dari berbagai pihak yang telah penulis terima selama dalam studi dan atau dari dalam pemrosesan penulisan tesis ini terwujud tidak dapat disebutkan satu persatu. Meskipun tidak ditulis tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lainnya.

Dari lubuk hati penulis sampaikan rasa hormat dan bangga pada orang tua yang telah membesarkan mendidik menasehati dan memotivasi secara terus menerus sampai hari ini untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bp. Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr. SP.PDCK., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bpk. H. Achmad Busro, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bpk. Prof. IGN. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bpk. R. Suharto, SH. M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bpk. Paulus Hadi Soeprapto, SH. M.Hum., selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bpk. Noor Rahardjo, SH. M.Hum., selaku Dosen Konsultan dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini.
8. Para Guru Besar beserta para Bapak/Ibu Dosen pada Program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang dengan iklas menularkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Tim Reviewer Proposal Penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar magister kenotariatan di Universitas Diponegoro.
10. Team Mahasiswa angkatan tahun 2001 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

11. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wilayah Semarang Barat beserta staf dan karyawannya, dimana penulis mengambil obyek penelitian dalam rangka penyelesaian pembuatan tesis ini.

Akhirnya penulis ucapkan banyak terima kasih pada para pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini.

Menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan rendah hati penulis mengharap masukan yang bermanfaat dari para pembaca selama memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Semarang, Desember 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRCT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Thesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Badan Hukum Yayasan	15
1. Pengertian	15
2. Kegiatan Usaha dan Tujuan Sosial Yayasan	17
3. Kekayaan Yayasan	19
4. Organ-organ Yayasan	20
5. Pembukuan Yayasan	22

B. Pajak	25
1. Pengertian Pajak	25
2. Kedudukan Hukum Pajak	28
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	29
4. Hambatan Pemungutan Pajak	32
5. Sanksi-sanksi Perpajakan	33
C. Aspek-aspek Perpajakan Yayasan dan Problematikanya	35
1. Kedudukan Yayasan Sebagai Wajib Pajak	35
2. Hak dan Kewajiban Yayasan Sebagai Wajib Pajak	38
a. Hak Yayasan Sebagai Wajib Pajak	38
b. Kewajiban Yayasan Sebagai Wajib Pajak	42
3. Perlakuan Perpajakan Bagi Yayasan	45
a. PPh Yayasan	45
b. PPN Yayasan	50
c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	51
d. Bea Metarai	57
e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	58

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah	63
B. Spesifikasi Penelitian	63
C. Lokasi Penelitian	64
D. Teknik Penentuan Sampel	65
E. Teknik Pengumpulan Data	65

F. Teknik Analisa Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Keadaan Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat	68
1. Kondisi Geografis	68
2. Kondisi Demografi	71
3. Kondisi Sosial Ekonomi	72
4. Gambaran Ekonomi Daerah	74
B. Perlakuan Perpajakan Bagi Yayasan	76
1. Pajak Penghasilan (PPh)	78
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPh BM)	81
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	84
4. Bea Meterai	87
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ...	88
C. Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Yayasan	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	94
RINGKASAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Keberadaan Yayasan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, namun demikian pengakuan yayasan dalam perundang-undangan sendiri baru ada pada tahun 2001, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Maka sejak itu eksistensi Yayasan di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kokoh, setelah selama ini pendirian Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi.

Di masa lalu pendirian Yayasan yang hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi, di samping yang sungguh-sungguh bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, telah dipergunakan pula untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari tujuan semula, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus Yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan.

Perlakuan sebuah Yayasan seringkali oleh pendiri, pengurus diperlakukan sebagaimana layaknya perseroan terbatas. Yayasan didirikan untuk memiliki saham, untuk melakukan usaha bisnis, untuk mengelola gedung secara komersial, untuk menjalankan biro perjalanan dan menjalankan usaha penyaluran ke luar negeri. Dalam hal ini Yayasan dipergunakan sebagai badan usaha. Juga termasuk perusahaan yang mendirikan Yayasan untuk dimanfaatkan dalam menjalankan usaha disamping untuk mendapatkan keringanan pajak. Ini merupakan suatu bentuk pengelabuan hukum.

Mengutip hasil penelitian George J. Aditjondro, tahun 1998 :

"Menegenai Yayasan milik mantan presiden Soeharto, setidaknya ada 77 yayasan yang kepemilikannya dapat dihubungkan dengan mantan presiden Soeharto. Dari sekian banyak tersebut, tiga di antaranya cukup likuid dan dijadikan mesin uang keluarga Soeharto. Masing-masing Yayasan Dharmais, Yayasan Supersemar, Yayasan Dakab. Ketiga Yayasan tersebut melalui PT Nusamba sedikitnya menjadi pemegang saham di 140 perusahaan".¹

Sebagai salah satu contoh kasus hukum yang melibatkan Yayasan yang masih segar dalam ingatan kita sekarnag ini adalah kasus penyalahgunaan dana non bugeter Bulog yang menyeret ketua DPR RI Bp. Ir. Akbar Tanjung yang menjadi salah satu terdakwa, telah melibatkan Yayasan Raudatul Janah yang eksistensinya tidak jelas.

Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan telah memberikan landasan hukum bagi kehidupan yayasan di Indonesia.

Akan tetapi, undang-undang yang baru ini disamping mengatasi masalah juga telah menimbulkan pula berbagai permasalahan. Undang-undang ini menegaskan kedudukan hukum Yayasan, bahwa Yayasan boleh berusaha memperoleh laba, menjawab pertanyaan siapa pemilik Yayasan, serta keharusan Yayasan bersifat terbuka, dan harus mempertanggung jawabkan

¹ Forum Keadilan No. 15, 15 Juli 2001, hal. 20.

kegiatannya kepada publik. Terdapat pula hal-hal yang belum jelas, umpamanya apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, kesalahan dan kelalaian organ Yayasan, itikad baik, belum siapnya berbagai peraturan pemerintah serta persoalan kontra prestasi bagi organ Yayasan. Tentu saja undang-undang yang baru ini memberikan dampak tersendiri bagi yayasan yang sudah berdiri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001.

Karakteristik Yayasan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomer 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
 - a. Ali Rido menerjemahkan pengertian Yayasan menurut P. Scholten dengan unsur-unsur :
 - Badan hukum yang dilahirkan oleh pernyataan sepihak.
 - Pernyataan berisi pemisahan harta kekayaan
 - Untuk tujuan tertentu dengan menunjukkan bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan.
 - b. Persyaratan Pendirian Yayasan
 - 1) Syarat materil :
 - Pemisahan harta kekayaan
 - Penentuan tujuan tertentu
 - Adanya suatu organisasi
 - 2) Syarat formil : pendirian yayasan harus dalam wujud Akta Notariil.

- c. Perbedaan pokok antara Yayasan dengan perseroan Perdata, menyangkut bidang organisasi dan pemodalan; dalam praktik kekuasaan tertinggi Yayasan ada pada para pendirinya.

Praktik peradilan selama ini terfokus pada kedua syarat pendirian Yayasan; pemisahan harta kekayaan sangat banyak dijadikan alasan menuntut para pengurus Yayasan karena pada umumnya hasil usaha Yayasan telah dijadikan objek perebutan kedudukan dalam kepengurusan Yayasan. Anak keturunan para pendiri sering muncul jadi pihak berperkara karena melihat adanya kelemahan dalam organisasi Yayasan; isi akta pendirian Yayasan sering dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan Yayasan, seolah-olah akta pendirian dapat dirubah setiap saat sesuai keinginan pengurus Yayasan.

2. Sesudah berlakunya UU No. 16 Tahun 2001, tentang Yayasan
 - a. Yayasan pada hakekatnya adalah kekayaan yang dipisahkan yang oleh UU diberi status badan hukum.
 - b. Yayasan adalah subjek hukum mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ Yayasan;
 - c. Maksud, tujuan dan kegiatan usaha :
 - Bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Pasal 1:1)
 - Maksud dan tujuan tidak dapat dirubah (Pasal 17).
 - Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha (Pasal 3: 1, Pasal 7).

- Badan usaha yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan usaha (Pasal 7, 1, Pasal 8).
- d. Hasil kegiatan tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- e. Yang berhak mengubah kegiatan Yayasan adalah Rapat Pembina, dan bahwa perubahan AD, harus mendapat persetujuan Menteri.

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan Yayasan di Indonesia, serta menjadikan kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud yang berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Penggunaan prinsip akuntansi, Moenaf H. Regar dalam bukunya yang berjudul *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntansi Publik* disebutkan sebagai berikut

"Peraturan pajak tidak memberikan pedoman menyusun neraca tapi ada yang dinamakan laba kena pajak/laba fiskal. Laba kena pajak dihitung dengan mempergunakan akuntansi dan berpedoman pada undang-undang perpajakan sebagaimana mengacu pada prinsip akuntansi".²

Dalam sektor pendidikan disebutkan dalam pasal 51 undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa "Pengelolaan satuan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan / perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan".³

² Moenaf H. Regar, *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal. 44.

³ Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Himpunan*, IKIP Press, Semarang, 1991, hal. 17.

Badan yang dimaksud dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional bahwa Pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus dikelola oleh Yayasan atau Badan yang bersifat sosial.

Demikian pula dengan sektor kesehatan kesehatan dalam pasal 58 UU No. 23 Tahun 1990 tentang kesehatan yang mensyaratkan sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat termasuk rumah sakit harus berbadan hukum.

Pembentukan Yayasan merupakan sarana yang paling efektif bagi masyarakat bila ingin berpartisipasi dalam bidang-bidang tersebut di atas sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan. Sehingga akibatnya bahwa pendirian Yayasan hanya sekedar untuk memenuhi syarat perundang-undangan saja, sementara pada kenyataannya bahwa Yayasan tersebut dikelola sebagai layaknya sebuah perseroan yang merupakan badan hukum yang mencari keuntungan.

Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh sebuah Yayasan dalam mendapatkan sumber pendanaan bagi kelangsungan Yayasan? Karena pendanaan bagi yayasan merupakan pokok kelangsungan Yayasan untuk bisa eksis, apakah cukup meminta atau menerima sumbangan dari donatur saja ataukah bisa dimungkinkan untuk usaha bilamana hasil kegiatan tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Bagaimana dalam hal perpajakannya, apakah ia termasuk dalam kategori wajib pajak atau tidak? Bila ia wajib pajak, apakah hal-hal wajib yang harus dilakukan sebagai wajib pajak dan bagaimana perlakuannya?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota".⁴

Dalam struktur organisasi Yayasan tidak ada istilah anggota, yang ada adalah pengurus, pembina dan pengawas.

Yayasan merupakan subyek pajak menurut perundang-undangan perpajakan. Pengakuan Yayasan sebagai subyek pajak dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan Badan adalah

"Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana".⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka Yayasan memenuhi syarat sebagai subyek pajak, walaupun Yayasan digolongkan sebagai

⁴ HP Panggabean, SH. MS., *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 192.

⁵ Moch. Yudhi P, *Sekilas Tentang Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Implikasinya Terhadap Sektor Pajak*, Berita Pajak, No. 1485/Tahun XXXV/15 Februari 2003, hal. 28.

organisasi nirlaba yang bergerak di bidang-bidang tertentu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan).

Makna dari nirlaba (*not – for – profit*) adalah bahwa Yayasan tidak membagikan laba atau keuntungan yang diperolehnya baik dalam bentuk defiden, bagian laba, dan sejenisnya karena Yayasan tidak mempunyai pemilik maupun anggota. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

Bagi pemerintah pajak menetapkan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan sangat menentukan dalam pengharapan tabungan pemerintah (*public saving*) agar nantinya dapat membiayai sendiri pembangunan tanpa ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang merupakan penerimaan pembangunan. Sehingga tidak mengherankan manakala pemerintah berupaya untuk menggali berbagai sektor yang yang bisa dikenakan pajak dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Yogia S. Meliala:

"Penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan dalam negeri (pajak dan bukan pajak) dan penerimaan pembangunan (bantuan program dan bahan program). Penerimaan dalam negeri lebih kurang 81% dari seluruh penerimaan negara. Sedangkan sumber penerimaan dari negeri sendiri lebih kurang 98% berasal dari penerimaan pajak".⁶

Menyadari betapa pentingnya arti sebuah pajak bagi pembangunan, khususnya badan hukum suatu lembaga terutama Yayasan, maka penulis tertarik untuk mengkaji beberapa ketentuan mengenai Undang-Undang

⁶ Yogia S. Meliala, *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*, Penerbit ARMICO Bandung, hal. 1-2.

Yayasan terutama mengenai pengaruhnya terhadap sektor pajak. Dengan melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul : ASPEK-ASPEK YURIDIS FISCAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA.

B. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang merupakan wajib pajak, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk sebagai pemungut-pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Sebagai badan yang merupakan wajib pajak, dalam kegiatan usaha, Yayasan akan diperlakukan berbagai perpajakan di Indonesia dalam hal ini penulis hanya membatasi pada perlakuan perpajakan bagi Yayasan yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Semarang Barat.

Penulis mengambil lokasi tersebut karena wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Semarang Barat berada di lokasi Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yang merupakan pusat perekonomian dan lalu lintas perdagangan yang banyak dijumpai keberadaan Yayasan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak apa sajakah yang dikenakan terhadap Yayasan ?

2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Yayasan dalam membayar pajak-pajaknya ?
3. Hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan perpajakan bagi Yayasan ?

Keterangan :

Bahwa kepatuhan diukur dari kriteria dalam membayar pajak Yayasan, yaitu :

- Patuh : membayar pajak
- Tidak patuh : tidak membayar pajak

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk memperoleh informasi tentang pajak-pajak apa yang dapat dikenakan terhadap badan hukum Yayasan.
- 2) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan bagi Yayasan dalam hal membayar pajak-pajaknya.
- 3) Untuk mengetahui hambatan atau kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perpajakan pada Yayasan.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :

- 1) Praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi
 - 1) Pendiri dan pengurus yayasan, bahan informasi untuk meningkatkan yayasan tentang arti pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan bagi bangsa dan negara.

- 2) Dasar bagi para petugas pemungut pajak untuk menarik pajak bagi Yayasan.
 - 3) Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat sehingga lebih memahami tentang Yayasan dan memanfaatkan fungsi dan tujuan Yayasan yang sesuai dengan landasan perundang-undangan yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
 - 4) Memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan Yayasan.
 - 5) Upaya sosialisasi Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- b. Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya
- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan hukum pajak khususnya yang berkenaan dengan lembaga yang berbentuk Yayasan.
 - 2) Bagi akademik, hasil ini dapat dijadikan referensi dalam mempelajari hukum pajak dan Yayasan.

E. SISTEMATIKA THESIS

Secara garis besarnya thesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Bagian Awal Thesis

Pada bagian awal ini, memuat : halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi Thesis

Pada bagian ini terdiri dari beberapa bab, masing-masing bab merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan

yang lainnya. Pembuatan sistematika dimaksudkan supaya dalam penulisan ini lebih terarah sehingga dengan mudah untuk mengetahui isi keseluruhan dari thesis ini.

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas dari masing-masing bab dalam thesis ini, maka diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab kesatu, berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bahasan : alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Alasan penulisan judul menguraikan latar belakang aspek-aspek yuridis fiscal Yayasan dan problematikanya yang mendorong bagi penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penulisan ini. Agar pembahasannya tidak terlalu meluas dan mengambang, maka penulisan ini dibatasi pada obyek tertentu pada pembatasan masalah. Perumusan masalah berisi beberapa permasalahan, dalam hal ini dimaksudkan agar memudahkan penulis dalam membahas bentuk permasalahan yang diteliti. Tujuan dan kegunaan penulisan ini berisi mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan kegunaannya. Sedangkan sistematikanya berisi gambaran untuk memudahkan dalam menangkap isi keseluruhan thesis ini.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 4 (empat) sub bahasan, yaitu : badan hukum Yayasan, pajak, aspek-aspek perpajakan Yayasan dan problematikannya / pemungutan pajak Yayasan. Sekitar pengertian Badan Hukum Yayasan, kegiatan usaha dan tujuan sosial Yayasan, kekayaan, organ-organ dan dengan pembukuan yayasan. Pengertian pajak,

kedudukan hukum pajak, tata cara, hambatan dan sanksi perpajakan. Aspek perpajakan bagi Yayasan yang menguraikan tentang : Yayasan sebagai wajib pajak, hak dan kewajibannya, serta perlakuan perpajakannya.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa macam sub bahasan yaitu : metode penelitian, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Metode pendekatan menguraikan metode yang dipergunakan dalam penelitian thesis ini yaitu metode yuridis normatif dan empiris. Spesifikasi penelitian berisi tentang spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu diskriptif analisis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah KPP Wilayah Semarang Barat karena berada di Ibu kota Propinsi Jawa Tengah yang merupakan pusat kegiatan pemerintah dalam bisnis di Jawa Tengah. Teknik penentuan sampel menguraikan tentang sejumlah Yayasan yang telah mendapat terdaftar di Monografi Fiscal Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Barat yang kemudian dipilih sebagai sampel. Teknik pengumpulan data berisi tentang cara perolehan data yaitu melalui data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisa data menguraikan tentang pengolahan data secara sistematis dan komprehensif terhadap cara penjelasan permasalahan yang dibahas.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub bahasan yaitu : gambaran umum keadaan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat, perlakuan perpajakan Yayasan pada hambatan

pelaksanaan pemungutan pajak Yayasan. Gambaran umum keadaan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat menguraikan tentang kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, gambaran ekonomi daerah dan penerimaan pajak. Perlakuan perpajakan bagi Yayasan menguraikan tentang pajak penghasilan Yayasan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah Yayasan, bea materai bagi Yayasan, pajak bumi dan bangunan Yayasan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi Yayasan. Sedangkan hambatan pelaksanaan pemungutan pajak menguraikan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bagi Yayasan sehingga tidak dapat diperoleh pendapatan pajak secara maksimal.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari dua sub bahasan yaitu kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian baik kepustakaan maupun lapangan yang telah diuraikan dari bab kesatu sampai dengan bab kelima, sedangkan saran-saran berisi sumbangan dari penulis yang dapat digunakan bagi semua pihak.

3. Bagian Akhir Thesis

Pada bagian akhir penulisan ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Demikian uraian garis besar sistematika thesis ini, sehingga dapat membantu menggambarkan kejelasan dari thesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BADAN HUKUM YAYASAN

1. Pengertian

Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengakhiri perdebatan para ahli hukum apakah Yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ini, maka status badan hukum Yayasan, yang semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het Open systeem van Rechtspersonen*), beralih berdasarkan sistem tertutup (*de gesloten systeem Van Rechtspersonen*). Artinya, sekarang Yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang. Bukan berdasarkan sistem terbuka, yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi.

Berdasarkan teori kekayaan bertujuan yang pada mulanya diajukan oleh A. Brinz, dinyatakan bahwa "Suatu badan hukum dapat merupakan atau terdiri dari kekayaan yang dipisahkan atau untuk mencapai tujuan tertentu",¹

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan

¹ Dr. Chataramasjid, SH. MH., Badan Hukum Yayasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 2.

tetapi, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada 1 (satu) manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Pada Yayasan tujuan itu adalah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan. Teori ini secara selintas mendukung pula pandangan bahwa Yayasan adalah milik masyarakat.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- (3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.²

Pasal 4 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

² HP Panggabean, SH. MS., *Op. Cit.*, hal. 194.

Dalam hal kedudukan Yayasan disebutkan nama kecamatan, kabupaten, kota dan propinsi.

Ketentuan butir 1, butir 2, dan butir 3 mengenai apa yang dimaksud dengan Pengadilan, Kejaksaan, dan Akuntan; haruslah dihubungkan dengan mekanisme pengawasan terhadap Yayasan yang diatur dalam undang-undang itu.

2. Kegiatan Usaha dan Tujuan Sosial Yayasan

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memberikan kesempatan bagi Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana terlihat dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 3 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

- "1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- 2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas."³

Jelas terlihat dari ketentuan di atas, bahwa kegiatan usaha Yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Ketentuan dalam ayat (2) di atas, lebih mempertegas bahwa kegiatan usaha dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan Yayasan dan bukan untuk kepentingan organ Yayasan.

Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

³ *Ibid*, hal. 192.

- "(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana.
- (4) Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁴

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Ketentuan di dalam pasal-pasal di atas, menghapuskan kontroversi apakah Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan usaha. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, atau lebih tegas dapat melakukan kegiatan usaha yang memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya. Kegiatan dengan tujuan mengejar laba haruslah tidak diperbolehkan memilih bentuk badan hukum Yayasan, tetapi bentuk badan hukum lain yang tersedia untuk maksud mengejar laba seperti Perseroan Terbatas umpamanya.

Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, baik dengan menjadi peserta dari suatu badan usaha, maupun dengan

⁴ *Ibid*, hal. 193.

memendirikan suatu badan usaha baru, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

3. Kekayaan Yayasan

Di samping apa yang diperoleh dari kegiatan usaha Yayasan, diperoleh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Pasal 26 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

- (1) "Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan."⁵

Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Wakaf adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum. Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit. Mengenai besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan

⁵ *Ibid*, hal. 199.

⁶ Dr. Chamtaramasjid Ais, SH. MH., *Badan Hukum Yayasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 6.

ketentuan hukum waris. Adapun yang dimaksud dengan perolehan lain, misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil badan usaha yang didirikan oleh Yayasan atau hasil penyertaan Yayasan pada suatu badan Usaha.

Pasal 27 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

- (1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁷

Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

4. Organ-organ Yayasan

a. Pembina

Anggota Pembina diangkat dari orang perseorangan yang adalah pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Pembina mempunyai semua kewenangan yang tidak diserahkan baik kepada pengurus maupun Pengawas oleh Undang-Undang ataupun Anggaran Dasar. Ketentuan ini sangat mirip dengan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan terbatas, dan juga ketentuan bahwa Anggaran Dasar berlaku sebagai undang-undang bagi perseroan terbatas bersangkutan.

⁷ HP Panggabean, SH. MS., *Op. Cit.*, hal. 199.

Dalam hal karena sebab apapun, Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keadana itu terjadi harus diadakan rapat gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas untuk mengangkat Pembina, untuk mengisi kekosongan yang terjadi.

b. Pengurus.

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Peran pengurus sangat dominan dalam suatu organisasi Yayasan bilamana pendiri merangkap pengurus Yayasan. Pada Yayasan hal ini lebih mencolok lagi dalam keadaan tidak adanya pendiri ataupun pada situasi di mana Pendiri merangkap sebagai Pengurus. Keadaan ini hanya mungkin sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 secara efektif. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 secara efektif tidak memperkenankan adanya suatu jabatan rangkap.

c. Pengawas

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengatur adanya suatu Badan Pengawas atau Pengawas dalam suatu Yayasan, yang bersifat internal Yayasan itu sendiri. Undang-undang ini tidak mengatur adanya suatu

Pengawas atau Badan Pengawas eksternal, seperti *Charity Commission* di Inggris umpamanya. Jadi di sini Pengawas itu merupakan organ dari masing-masing Yayasan. Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada Pengurus. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pengawas diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pengawas diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pembina wajib memberitahukan secara tertulis perihal penggantian ini kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kepada instansi terkait. Penggantian ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, atau Pengadilan dapat membatalkannya atas permintaan yang berkepentingan dan tegas dalam hal mewakili kepentingan umum.

5. Pembukuan Yayasan

Sesuai amanat UU No. 16/2001, Yayasan diwajibkan membuat laporan keuangan baik untuk kepentingan internal (organ Yayasan) maupun eksternal (publik). Ketentuan mengenai pelaporan keuangan Yayasan disebutkan dalam Bab VIII tentang Laporan Tahunan, terutama pada Pasal 48 s.d Pasal 52 sebagai berikut :

- a. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak atau kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan;

- b. Pengurus juga wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan;
- c. Setiap tahun, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis, dengan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas dan disahkan oleh rapat pembina paling lambat 5 (lima) bulan sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, dengan memuat sekurang-kurangnya:
 - Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang dicapai,
 - Laporan keuangan, yang meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan (*disclosures*) laporan keuangan.
- d. Ikhtisar laporan tahunan diumumkan pada papan pengumuman kantor yayasan dan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- e. Pengurus dan Pengawas bertanggung jawab renteng apabila dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan kepada pihak-pihak yang dirugikan;
- f. Yayasan wajib mengumumkan ikhtisar tersebut pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan wajib diaudit oleh akuntan publik apabila memenuhi kriteria:
 - Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau
 - Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- g. Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh & HAM) dan instansi terkait.⁸

Sebagai sebuah organisasi nirlaba, Yayasan menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sebagai dasar berpijak dalam menyusun pembukuan terutama apabila yayasna telah memenuhi kriteria poin f di atas.

Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyimbang, anggota

⁸ Moch. Yudhi P., *Op. Cit.*, hal. 31.

organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba, meliputi informasi mengenai :

- a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
- d. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
- e. Usaha jasa suatu organisasi

Kepatuhan dalam penggunaan standar akuntansi sangat menentukan bagi pengurus dalam menyajikan informasi akuntansi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi yayasan.

Laporan keuangan harus dibuat paling lambat 5 bulan sejak tanggal tutup buku. Apabila tanggal tutup buku adalah akhir tahun (31 Desember), dimungkinkan Yayasan tidak sempat untuk menyusun SPT Tahunan karena belum selesainya laporan tahunan.

Untuk itu, Ditjen Pajak telah memberikan keleluasaan untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT kepada Yayasan dengan menggunakan formulir 1771-Y (Badan) ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat :

- a. "Permohonan diajukan secara tertulis kepada kepala KPP sebelum batas waktu penyampaian SPPT tahunan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya,
- b. Menyampaikan perhitungan sementara PPh yang terutang dan melampirkan laporan keuangan sementara.
- c. Melampirkan bukti pelunasan pajak yang terutang berupa Surat Setoran Pajak (SSP).
- d. Jika dalam 7 hari kerja tidak ditanggapi oleh KPP setempat, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- e. Perpanjangan penyampaian SPT tahunan diberikan paling lama enam bulan (2 kali perpanjangan)".⁹

Apabila ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT (31 Maret) s.d tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

B. PAJAK

1. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak ada beberapa ahli yang berpendapat, salah satu di antaranya batasan itu diajarkan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani (pernah menjabat guru besar dalam hal pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian pemimpin internasional Bureau of Fiscal Documentation, di Amsterdam) yang berbunyi sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

⁹ *Ibid*, hal. 31.

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".¹⁰

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah bahwa Andriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan (jadi, pungutan adalah lebih luas).

Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran "iuran" itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

Sedangkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH memberikan batasan pengertian pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (nonha prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".¹¹

Kemudian definisi tersebut dipertahankan sebagai koreksi dalam uraian buku yang berjudul Pajak dan Pembangunan "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

¹⁰ R. Santoso Brotodihardjo, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. ERESKO, Bandung, 1987, hal. 2.

¹¹ Drs. Mardiasmo, MBA, Akt, *Perpajakan Edisi 4*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 1.

surplusnya yang digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment".¹²

Dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak, dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal / kontra prestasi di mana yang secara langsung dapat ditunjukkan terhadap individu oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengamanan-pengamanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bertitik tolak pada uraian terdahulu dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan penekanan pengertian dibandingkan dengan definisi yang dirumuskan telah tersebut di atas, dimana dalam tulisan ini ditekankan bahwa pajak yang kita bayar merupakan kontribusi yang kita berikan atas pemanfaatan barang dan jasa publik yang telah terlebih dahulu kita manfaatkan dan nikmati.

Berbicara tentang pajak yang kita bayarkan, sebenarnya jumlah pajak yang kita bebaskan pada kita tidak sebanding dengan kenikmatan dan manfaat yang kita peroleh dengan tersedianya fasilitas umum. Terlebih lagi apabila jumlah pajak yang kita bayar tersebut kita bandingkan dengan jumlah

¹² Prof. Dr. Rohmat Soemitro, SH., *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, 1974, hal. 8.

pengeluaran yang harus kita keluarkan seandainya kita sendiri yang harus mengadakan fasilitas umum yang kita perlukan.

Pemerintah senantiasa berupaya penyesuaian atas peraturan, perundang-undangan perpajakan sejalan dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi dan budaya, sehingga pada tahun 2000 pemerintah telah menetapkan lima Undang-Undang di bidang perpajakan yang terdiri:

"Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dan UU Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan".¹³

2. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut :

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - Hukum Tata Negara
 - Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - Hukum Pajak
 - Hukum Pidana.¹⁴

¹³ Adinur Prasetyo, Ak., M.Si., *Peraturan Perundang-undangan Bidang Perpajakan di Indonesia dari Masa ke Masa*, Berita Pajak Nomor 1488/XXXV/1 April 2003, hal. 28.

¹⁴ Drs. Mardiasmo, M.BA., *Akt, Perpajakan*, Andi Yogyakarta, hal. 45.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. "Undang-undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. Prof. Drs. H. Rohmat Sumitro, SH., memberikan pernyataan sebagai berikut".¹⁵ Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut *paham oportunitas*, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

¹⁵ Prof. Drs. H. Rohmat Soemitro, SH., *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, PT. Eresco Bandung, 1990, hlm. 1.

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilanyang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada peemrintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.

- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assesmenet System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

5. Sanksi-sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Namun sebelum sanksi dikenakan oleh para wajib pajak terlebih dahulu dilakukan upaya apa yang dinamakan dengan penagihan pajak, menurut Muljo Hadi penagihan pajak adalah "serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubunga wajib pajak tidak melunasi baik

sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang tentang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".¹⁶

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja ada yang hanya diancam sanksi dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

Sanksi administrasi : merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu : berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Sanksi pidana : merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

Denda pidana : berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga

¹⁶ H. Muljo Hadi, SH., *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

Pidana penjara : seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

C. ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA

1. Kedudukan Yayasan Sebagai Wajib Pajak

Untuk menentukan apakah Yayasan memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dan dikenakan Pajak Penghasilan, maka terlebih dahulu harus dilihat pengertian Wajib Pajak. Secara umum dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang memiliki Objek Pajak. Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Badan meliputi : personal terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Yayasan, ormas, orsospol (Pasal 1 angka 2 – UU No. 17 Tahun 2000). Jadi jelas bahwa Yayasan memenuhi syarat

sebagai Subjek Pajak. Selanjutnya untuk menentukan apakah Yayasan memiliki Objek Pajak, maka harus dilihat apakah Yayasan memperoleh penghasilan. Dalam UU Pajak, penghasilan didefinisikan secara luas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 – UU No. 17 Tahun 2000). Namun UU Pajak memberikan beberapa pengecualian atas sumber-sumber penghasilan tertentu. Menurut Pasal 4 ayat 3 – UU No. 17 Tahun 2000, tidak termasuk sebagai Objek Pajak, antara lain :

- "a. Bantuan sumbangan
- b. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak.
- c. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan".

Jadi apabila diteliti pengertian Objek Pajak, maka Yayasan dapat memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak umpamanya dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan atau Yayasan mungkin hanya menerima bantuan sumbangan atau hibah yang dikecualikan dari Objek Pajak. Apabila Yayasan memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang akan dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya.

Secara khusus, Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2000 mendefinisikan Wajib Pajak sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pengertian Wajib Pajak menurut definisi tersebut mengandung makna yang lebih luas. Yayasan yang memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak dan memiliki Objek Pajak merupakan Wajib Pajak PPh badan dan dikenakan pajak penghasilan badan. akan tetapi, apabila ternyata Yayasan tidak memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak (misalnya hanya memperoleh sumbangan), Yayasan tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak untuk tujuan pengenaan Pajak Penghasilan Badan, namun demikian karena Yayasan juga membayar gaji karyawan, membayar sewa kantor, membayar jasa Notaris dan sebagainya, maka Yayasan ditentukan sebagai pemotong Pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan, pemilik gedung, Notaris dan sebagainya sehingga Yayasan memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dalam hal ini sebagai wajib pajak pemotong.

Yayasan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak (baik untuk PPh badan atau untuk PPh pemotong) diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomer pokok wajib pajak). Di samping itu, Yayasan yang menjalankan kegiatan penyerahan barang atau jasa tertentu di dalam daerah Pabean yang merupakan kegiatan rutin/kegiatan usaha Yayasan, maka atas penyerahan tersebut terutang PPN (10%) apabila barang atau jasa yang diserahkan merupakan objek PPN. Terdapat beberapa jenis barang atau jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, seperti barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman dan sebagainya dan berbagai jenis jasa seperti :

- a. "Jasa di bidang pelayanan kesehatan
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial

- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa di bidang pendidikan
- e. Jasa di bidang pendidikan
- f. Jasa di bidang kesenian dan hiburan
- g. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- h. Jasa bidang tenaga kerja
- i. Jasa di bidang angkutan umum (darat dan air)
- j. Jasa di bidang perhotelan".¹⁷

Apabila ternyata Yayasan menjalankan bisnis penyerahan barang atau jasa, akan tetapi omzet per tahunnya tidak melebihi Rp. 360.000.000,- untuk barang atau tidak melebihi Rp.180.000.000,- untuk jasa, maka Yayasan tidak wajib memungut PPN karena termasuk dalam kategori Pengusaha Kecil PPN (KMK 522/KMK.04/2000).

2. Hak dan Kewajiban Yayasan Sebagai Wajib Pajak

a. Hak Yayasan sebagai wajib pajak

1) Hak-hak yang Bersifat Umum

- a) Mendapat formulir-formulir perpajakan secara cuma-cuma.
- b) Mendapat penjelasan / penerangan seperlunya secara cuma-cuma;
- c) Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dalam penyelesaian urusan perpajakan;
- d) Menunjukkan orang lain untuk bertindak sebagai kuasa;
Mengajukan gugatan perdata ataupun pidana kepada Pengadilan Negeri atas dasar pembocoran rahasia yang menyebabkan timbulnya kerugian pada wajib pajak.

¹⁷ HP Panggabean, SH. MS., *Op. Cit.*, hal. 171.

- 2) Hak-hak sehubungan dengan pendaftaran diri
 - a) Menunjuk kuasa untuk mendaftarkan diri dan menerima tanda pendaftaran / kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Nomor Pengukuhan Penguasa Kena Pajak (NPPKP);
 - b) Mengajukan permintaan perubahan data sehubungan dengan kepindahan, penggantian jenis usaha;
 - c) Mengajukan permintaan penghapusan NPWP/NPPKP sehubungan dengan tidak lagi menjadi wajib pajak.
- 3) Hak-hak Sehubungan dengan SPT PPh /FPN
 - a) Menunjuk kuasa untuk menandatangani SPT;
 - b) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT;
 - c) Menetapkan sendiri pajak yang terutang melalui SPT. SPT yang sudah diisi dengan benar, setelah 10 tahun sejak tahun pajak berakhir, secara hukum "tetap dengan sendirinya", dan tidak dapat diganggu gugat lagi;
 - d) Melakukan pembetulan sendiri atas SPT yang telah dimasukkan dalam hal:
 - Terdapat kesalahan tulis /hitung
 - Terdapat kesalahan penerapan tarif
 - e) Mengungkapkan sendiri ketidakbenaran isi SPT baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan.
- 4) Hak-hak sehubungan dengan pembayaran, pelunasan dan penagihan pajak terutang
 - a) Mengajukan permohonan untuk:

- (1) Mengangsur atau menunda atas tuggakan pembayaran pajak;
 - (2) Restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak;
 - (3) Keberatan dan banding;
 - (4) Perpanjangan penyampaian pemasukan surat permohonan keberatan pajak;
 - (5) Mendapatkan penjelasan mengenai dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak untuk keperluan pengajuan kebenaran.
- b) Menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum diterbitkan keputusan keberatan;
 - c) Keberatan Wajib Pajak atas suatu ketetapan pajak dianggap diterima, apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan;
 - d) Mendapatkan imbalan bunga dari pemerintah karena Direktur Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;
 - e) Melakukan kompensasi kerugian dengan tahun-tahun yang lain selama lima tahun atau delapan tahun berturut-turut bagi usaha tertentu;
 - f) Mengkreditkan PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ke-3, termasuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajakyang terhutang;

- g) Mengajukan permohonan pembetulan atas surat ketetapan pajak yang salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - h) Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - i) Mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - j) Mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam hal Pajak Pertambahan Nilai.
- 5) Hak-hak lainnya
- a) Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pejabat pajak;
 - b) Dan lain-lain .
- 6) Hak-hak Yayasan sebagai Wajib Pajak PBB
- a) Mengajukan keberatan atau SPPT dan surat ketetapan pajak;
 - b) Mengajukan banding;
 - c) Mengajukan pengurangan pajak yang terutang disebabkan;
 - (1) karena kondisi Objek Pajak yang ada sehubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;

(2) dalam hal objek terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- d) Mengajukan pengurangan denda administrasi atas surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP);
- e) Mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi;
- f) Dan lain-lain.

b. Kewajiban Yayasan sebagai wajib pajak

1) Kewajiban Yayasan sehubungan dengan pendapatan diri :

- a) Sebagai wajib pajak, yayasan wajib mendaftarkan diri kepada KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak di mana yayasan berkedudukan untuk mendapatkan NPWP, dan apabila yayasan juga adalah PKP wajib melaporkan usahanya untuk mendapatkan NPPKP;

b) Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan NPPKP

Untuk yayasan, kewajiban pendaftaran hanya pada Kantor Pusat, dengan syarat sebagai berikut:

- (1) mengisi formulir pendaftaran;
- (2) foto copy akte pendirian;
- (3) foto copy KTP / SIM Paspor salah seorang pengurus;
- (4) foto copy surat izin usaha keterangan tempat usaha / surat keterangan lainnya dan instalasi yang berwenang;
- (5) apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi dengan surat kuasa.

Apabila Wajib Pajak pemohon berstatus cabang, maka wajib mendaftarkan sebagai pemungut / pemotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Jika Wajib Pajak tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, maka wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan syarat melampirkan foto copy kartu NPWP atau bukti pendaftaran Wajib Pajak dan Kantor Pusatnya.

2) Kewajiban Sehubungan dengan SPT PPh / PPN dan SPOP PBB:

- a) Mengambil sendiri;
- b) Mengisi dengan benar;
- c) Menandatangani;
- d) Mengembalikan / menyampaikan kembali;
- e) Mengisi SPO dan mengembalikan.

3) Kewajiban sehubungan dengan pembayaran, pelunasan dan pelaporan

- a) Menghitung, menyetor / membayar pajakyang tertuang pada Bank Pensepsi atau Kantor Pos dan Giro tepat pada waktu yang ditentukan;
- b) Melaporkan pajak yang dibayr pada KPP atau Kantor Pelyanan PBB (KPPBB) empat pendaftaran tepat pada waktu yang ditentukan.

4) Kewajiban sehubungan dengan penyelenggaraan pembukuan

- a) menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan;

b) Memenuhi persyaratan penyelenggaraan pembukuan, yaitu:

- (1) Selenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya;
- (2) Dikerjakan secara teratur dan pada akhir tahun ditutup dengan Laporan Keuangan (Neraca) dan Laporan Perhitungan Laba Rugi yang dalam yayasan umumnya disebut Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran, berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya;
- (3) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan;
- (4) Pembukuan dan dokumen harus disimpan selama 10 tahun.

5) Kewajiban sehubungan dengan pemeriksaan

- a) Memperhatikan dan meminjamkan pembukuan dan dokumen pendukung;
- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atas ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c) Memberikan keterangan yang diperlukan;
- d) Memberikan keterangan yang diperlukan dalam kaitannya sebagai pihak ketiga.

3. Perlakuan Perpajakan Bagi Yayasan

a. PPh Yayasan

Dasar hukum perlakuan pajak penghasilan bagi Yayasan dan organisasi yang sejenis:

- "1) SE-34/PJ.4/1995/tanggal 4 Juli 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan/organisasi yang sejenis.
 - 2) SE-39/PJ.4/1995/tanggal 19 Juli 1995 tentang penyuluhan tentang perlakuan pajak penghasilan bagi Yayasan/ organisasi yang sejenis.
 - 3) Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-87/PJ/1995".¹⁸
- Sesuai dengan prinsip keadilan, sejak 1 Januari 1995 dengan

berlakunya UU No. 10/1994 pemajakan terhadap penghasilan Yayasan tidak dibedakan dengan pemajakan terhadap penghasilan badan usaha lainnya sepanjang Yayasan memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Jadi sepanjang Yayasan menjalankan kegiatan usaha maka penghasilan Yayasan tidak dibebaskan dari pajak penghasilan walaupun hasil usaha Yayasan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pemajakan penghasilan dari kegiatan usaha terlepas dari bentuk hukum yang digunakan untuk melakukan usaha tersebut. Sebelum 1 Januari 1995, penghasilan Yayasan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sepanjang penghasilan tersebut berasal dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum (Pasal 4 ayat 3 huruf i – UU No. 7 Tahun 1983) dan penghasilan yang berasal dari modal sepanjang penghasilan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum (Pasal 4 ayat 3 huruf j – UU No. 7

¹⁸ Hadi Setia Tunggal, SH., *Tanya Jawab Pajak Penghasilan*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hal. 219.

Tahun 1983). Sayangnya fasilitas tersebut di atas ternyata banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dimana wadah Yayasan digunakan untuk melakukan usaha komersial agar dapat menikmati pembebasan pajak akan tetapi hasil usaha yang diperoleh ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu sejak 1 Januari 1995 fasilitas tersebut tidak lagi diberikan dengan diberlakukannya UU No.10 Tahun 1994 dan berdasarkan prinsip keadilan pemajakan atas penghasilan Yayasan tidak dibedakan dengan pemajakan atas penghasilan dari bentuk usaha lainnya. Prinsip keadilan tersebut terus digunakan dalam UU No. 17 Tahun 2000.

Kiranya menjadi jelas, bahwa berdasarkan UU Yayasan, Yayasan diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam upaya mencari sumber pendanaan, namun dari aspek yuridis fiskal penghasilan tersebut merupakan objek pajak kecuali sumber dana yang diperoleh dari sumbangan dan hibah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat pengecualian yang diberikan terhadap Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan (akan dijelaskan lebih lanjut).

Apabila dikaji, sumber dana Yayasan dalam suatu tahun pajak bisa berasal dari dua jenis penerimaan / penghasilan yaitu :

1. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 – UU No. 17 Tahun 2000 (karena dikecualikan oleh Undang-undang).

2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dapat dikenakan PPh dengan tarif umum atau yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengeluaran dana Yayasan dilakukan antara lain untuk membiayai berbagai kegiatan yayasan. Ditinjau dari aspek yuridis fiskal, biaya-biaya tersebut dapat digolongkan menjadi :

- 1) Biaya yang boleh dikurangkan (Pasal 6 – UU No. 17/2000)
- 2) Biaya yang tidak boleh dikurangkan (Pasal 9 – UU No. 17/ 2000)

Dengan demikian, penghasilan (neto) Yayasan adalah keuntungan yang merupakan selisih lebih antara Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dengan Biaya yang boleh dikurangkan, sebagai berikut:

Jumlah penghasilan yang merupakan Objek Pajak (tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final)		A
Dikurangi biaya yang boleh dikurangkan :		
1. Biaya operasional Yayasan	B	
2. Penyusutan dan amortisasi atas harta yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan Yayasan.	C	
3. Pemberian subsidi, bantuan, beasiswa, pengobatan/ perawatan bagi siswa atau pasien tidak mampu dan biaya lainnya.	D	
(B + C + D)		E
Selisih lebih (keuntungan) yang merupakan Penghasilan Kena Pajak (A-E) (F terlebih dahulu dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah)		F
Pajak Penghasilan Badan yang terutang: 10% x Rp. 50 juta pertama 15% x Rp. 50 juta berikutnya 30% x sisanya		

19

Apabila ternyata A lebih kecil dari E, maka selisih kurang tersebut merupakan kerugian Yayasan yang dapat dikompensasi-kan dengan

¹⁹ HP. Panggabean, SH., M.S., *Op. Cit.*, hal. 174

keuntungan tahun-tahun mendatang (maksimum 5 tahun) sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 – UU No. 17/2000.

Yayasan wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun buku. Di samping itu, Yayasan wajib menyetor dan melaporkan angsuran bulanan PPh 25 (apabila ada).

Khusus bagi Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, diberikan perlakuan khusus dalam bentuk pembebasan PPh atas selisih lebih (F) sepanjang dana hasil surplus tersebut digunakan untuk pembangunan prasarana gedung dan prasarana diperolehnya surplus tersebut. misalnya tahun 2000 Yayasan pendidikan memperoleh surplus (F). apabila dana hasil surplus tersebut digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan lainnya selama tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 maka atas surplus (keuntungan) tersebut tidak dikenakan PPh. (Kep. 87/PJ./1995 tanggal 10 Oktober 1995). Untuk dapat menikmati fasilitas tersebut, beberapa persyaratan administratif harus dipenuhi dalam bentuk pemberitahuan rencana pengeluaran tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan Dirjen Dikti yang ditunjuk, melakukan pencatatan tersendiri dan pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut dalam lampiran SPT Tahunan PPh.

Jadi bagi Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal, dana hasil surplus tidak dikenakan PPh sepanjang dapat dibuktikan bahwa surplus tersebut digunakan kembali untuk prasarana pendidikan dalam 4 tahun

kegiatan yang dibayarkan oleh Yayasan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri dipotong PPh 26.

- 2) Di samping itu, Yayasan juga wajib memotong PPh-23 atas pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri berupa bunga, royalty, sewa (kecuali sewa tanah/bangunan), imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan berbagai jenis jasa lain yang diatur dalam Kep-305/PJ./2001. Apabila penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak luar negeri, maka dipotong PPh 26.
- 3) Pembayaran sewa tanah / bangunan harus dipotong PPh yang bersifat final sebesar 10% apabila diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan 6% apabila diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri (PP 29 Tahun 1996).

Yayasan wajib menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) bulanan PPh 21/23/26 dan PPh Final eks. PP 29/1996. Di samping itu, wajib menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) tahunan PPh 21.

b. PPN Yayasan

Sering timbul pertanyaan, apakah Yayasan wajib memungut PPN atas penyelenggaraan kegiatannya? Sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur oleh Undang-Undang Pajak, tidak dibedakan antara penyelenggaraan kegiatan oleh Yayasan atau bentuk usaha lainnya. Sepanjang Yayasan melakukan suatu penyerahan barang atau jasa di dalam daerah Pabean yang dilakukannya dalam kegiatan usaha rutinnnya dan menurut UU PPN penyerahan tersebut terutang

mendatang. Surplus yang tidak digunakan dalam kurun waktu tersebut tidak diberikan pembebasan dan dikenakan PPh.

Yayasan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 – UU No. 16/2000. Di samping itu, Yayasan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pasal 49 UU No. 16/2001. Yang merupakan subyek pajak Yayasan menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro SH., adalah "orang pribadi, badan, dan persekutuan atau warisan yang belum terbagi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang".²⁰

Dalam menjalankan kegiatannya, Yayasan melakukan berbagai pembayaran baik kepada karyawan maupun kepada pihak ketiga, yang mungkin merupakan objek pemotongan PPh. Yayasan sebagai wajib pajak pemotong, Wajib melakukan pemotongan PPh dan menyetorkannya ke kas negara. Sebagai pemotong pajak, kewajiban Yayasan adalah memotong PPh terkait sehingga beban pajak sebenarnya dipikul oleh penerima penghasilan. Namun apabila Yayasan tidak melakukan pemotongan, maka Yayasan berkewajiban untuk melunasi jumlah yang seharusnya dipotong. Beberapa contoh kewajiban Yayasan untuk melakukan pemotongan PPh adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000, pemotongan PPh 21 harus dilakukan atas pemberian honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan imbalan pekerjaan, jasa dan

²⁰ Prof. Dr. H. Rohmat Soemitro, SH., *Pajak Penghasilan*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal. 52.

PPN, maka Yayasan wajib melakukan pemungutan PPN. Terdapat beberapa jenis penyerahan barang atau penyerahan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila Yayasan melakukan penyerahan sebagaimana dijelaskan di atas dalam omzet Yayasan melebihi batas jumlah Rp.360.000.000,- untuk penyerahan barang atau Rp. 180.000.000,- untuk penyerahan jasa, maka Yayasan memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memohon untuk dikukuhkan menjadi PKP. Sebagai PKP Yayasan wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Objek pajak

Objek pajak PBB adalah bumi dan / atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan. Pada dasarnya semua bumi dan bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia bisa dimasukkan sebagai objek pajak, termasuk yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Namun terhadap bumi dan bangunan tertentu dapat dikecualikan dan pengenaan PBB antara lain:

- "a) Tanah dan / atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b) Tanah dan / atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala museum atau yang sejenisnya;

- c) Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
- d) Tanah dan atau bangunan yang digunakan diplomatik, konsulat dan perwakilan organisasi internasional dengan asas timbal balik".²¹

Tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5% x nilai jual kena pajak (NJKP).

Nilai jual kena pajak (NJKP) merupakan dasar penghitungan PBB atau lazim dikenal sebagai *assessment value*. NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Dalam menetapkan NJKP ini pemerintah memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi nasional. Nilai jual objek pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau dengan nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti, tarif PBB merupakan tarif tunggal dan berlaku sama untuk semua jenis objek pajak (perumahan, perkantoran, industri, hotel dan sebagainya).

Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau memiliki, menguasai dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam menghitung besarnya PBB yang terutang, ditentukan terlebih dahulu nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJPPTKP), ditentukan secara regional dengan maksimum sebesar Rp. 12.000.000,00. Dengan

²¹ GG Consultant, *Suara Merdeka*, hal. XII, Selasa 1 Juli 2003.

demikian maka besarnya PBB terutang dihitung dengan rumus umum sebesar berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times \text{NJKP}$$

$$\text{PBB} = 0,5\% \times \text{NJKP}$$

$$\text{PBB} = 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJPPTKP})$$

$$\text{PBB} = 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

2) Pengenaan PBB atas Rumah Sakit Swasta

Pengenaan PBB atas rumah sakit swasta diatur dalam UUPBB jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7961/KM.04/1995, tanggal 20 Agustus 1993. Menurut ketentuan tersebut pengenaan PBB atas rumah sakit swasta dibedakan antara Rumah Sakit Swasta Instansi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) dan Rumah Sakit Swasta bukan IPSM.

Yang disebutkan dengan Rumah Sakit Swasta IPSM adalah Rumah Sakit Swasta yang :

- a) 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
- b) SHU (Sisa Hasil Usaha) digunakan untuk investasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar Rumah Sakit.

Bagi Rumah Sakit jenis ini, Bumi dan Bangunan yang dikuasai/ dimiliki / dimanfaatkan dikenakan PBB sebesar 50% dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

Dengan demikian, rumusan perhitungannya menjadi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{PBB} &= 50\% \times 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= 0,05\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\end{aligned}$$

Sedangkan terhadap Rumah Sakit Swasta pemodal yang bukan Rumah Sakit Swasta IPSM dan didirikan oleh suatu badan yang berbentuk PT dikenakan PBB secara penuh (100%) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya atas Bumi dan Bangunan yang dikuasai / dimiliki / dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan oleh secara langsung, dan terletak di luar lingkungan Rumah Sakit, tetap dikenakan PBB secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta

Dari rumusan yang diatur secara khusus dalam UUPBB, yaitu yang diatur dalam :

- a) Pasal 2 ayat (1), bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan.
- b) Pasal 3 ayat (1) huruf a, bahwa Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB adalah Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- c) Pasal 4 ayat (1), bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Ini berarti jika berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, PTS tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan berfungsi melayani kepentingan umum di bidang pendidikan, maka atas bumi dan bangunannya tidak dikenakan PBB. Namun, jika ternyata terdapat bukti-bukti yang mengarah ke tujuan untuk memperoleh keuntungan, maka dapat dikatakan bahwa PTS tersebut sudah tidak murni lagi berfungsi sosial. Dengan demikian maka bagi PTS tersebut layak dikenakan PBB, oleh karena yang bersangkutan telah memperoleh manfaat dan dikenakan atas Objek Pajak yang dikelolanya, sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Objek Pajak yang dikecualikan dan pengenaan PBB. Berdasarkan uraian di atas, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan pedoman tentang pengenaan PBB atas PTS, yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 10 - / PJ.6 / 1995 tanggal 24 Februari 1995 dengan pokok-pokok ketentuan antara lain :

- (1) Penerbitan Surat Pemberitahuan Terutang (SPPT) PBB atas PTS dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- (a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun rata-rata sama atau lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu tahun;

- (b) Luas bangunan sama atau lebih dari 2.000 m²;
- (c) Lantai / tingkat bangunan sama atau lebih dari 4 lantai;
- (d) Luas tanah sama atau lebih dari 20.000 m² ;
- (e) Jumlah mahasiswa sama atau lebih dari 3.000 mahasiswa.

Kriteria tersebut di atas dianggap sebagai indikator / fenomena adanya kecenderungan PTS mengarah kepada usaha yang memperoleh keuntungan.

- (2) Pengenaan PBB-nya diberikan keringanan, yaitu hanya dikenakan sebesar 50% dan jumlah PBB yang seharusnya terutang, karena walaupun PTS tertentu telah berkembang sebagai lembaga yang juga bersifat ekonomis dan memperoleh keuntungan, tetapi fungsi sosialnya tetap melekat sebagai instansi yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Apabila PTS dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-nyata tidak memperoleh surplus / keuntungan / ada bukti-bukti lain yang dapat dipertimbangkan misalnya bencana alam, maka PTS tersebut dapat diberikan pengurangan / pembatalan SPPT dengan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menunjukkan besarnya manfaat yang diperoleh maupun beban yang ditanggung oleh subyek pajak, sehubungan dengan pengelolaan Objek PBB tersebut. besarnya pengurangan tersebut maksimum 75%, kecuali karena bencana alam dapat diberikan pengurangan sampai 100%.

d. Bea Materai

Bea materai adalah "pajak, yang dipungut dari rakyat untuk keperluan membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara".²² Obyek bea materai adalah dokumen sebagaimana diatur dalam UUBM. Bea Materai dikenakan atas dokumen yang berbentuk :

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan / keadaan yang bersifat perdata;
- 2) Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- 4) Surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - a) Yang menyebutkan penerimaan uang;
 - b) Yang menyatakan pembukuan uang / penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
 - c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;
 - d) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya / sebagian telah dilunasi / diperhitungkan;
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 6) Efek dengan nama dan bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

²² Drs. Lichoen Tedjosiswojo, *Bea Materai*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 7.

- 7) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
- a) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
 - b) Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan bea materai dengan tarif Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). Sedangkan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f, yang mempunyai nilai nominal lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Apabila harga nominal tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) terutang bea materai khusus untuk dokumen berupa cek bilyet giro ditetapkan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan / bangunan, yang meliputi perbuatan / peristiwa hukum sebuah berikut :

Pemindahan hak karena :

- 1) Jual beli;

- 2) Tukar – menukar;
- 3) Hibah;
- 4) Hibah wasiat;
- 5) Waris;
- 6) Pemasukan dalam perseroan / badan hukum lainnya;
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Penggabungan usaha;
- 11) Peleburan usaha;
- 12) Pemekaran usaha;
- 13) Hadiah;

Pemberian hak baru karena :

- 1) Kelanjutan pelepasan hak;
- 2) Di luar pelepasan hak.

Adapun hak-hak atas tanah yang dimaksud meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Pada umumnya semua bentuk perbuatan atau peristiwa tersebut di atas yang dilakukan oleh subjek pajak, baik orang perorangan pribadi maupun badan, termasuk Yayasan, adalah perbuatan yang terutang BPHTB, dengan pengecualian khusus bagi Yayasan :

- 1) Perolehan hak atas tanah dan bangunan karena wakaf;

- 2) Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang merupakan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Besarnya NPOP ditentukan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal jual beli adalah harga transaksi;
- 2) Dalam hal tukar menukar adalah nilai pasar;
- 3) Dalam hal hibah adalah nilai pasar;
- 4) Dalam hal hibah wasiat adalah nilai pasar;
- 5) Dalam hal waris adalah nilai pasar;
- 6) Untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- 8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- 9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- 10) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- 11) Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- 12) Peleburan usaha adalah nilai pasar;
- 13) Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- 14) Hadiah adalah nilai pasar;

15) Penunjukan pembeli adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOPPBB. Sedangkan besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60.000.000,00.

Saat terutang BPHTB adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal jual beli pada saat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- 2) Dalam hal tukar menukar pada sat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- 3) Dalam hal hibah pada saat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- 4) Dalam hal waris sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
- 5) Untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya pada saat atau tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- 6) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan pada saat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- 7) Lelang sejak tanggal penunjukan pemengan lelang;
- 8) Putusan hakim sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 9) Hibah wasiat sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertahanan;

- 10) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak pada saat / tanggal ditandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak;
- 11) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak pada saat / tanggal ditandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak;
- 12) Penggabungan usaha pada saat / tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- 13) Peleburan usaha pada saat / tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- 14) Pemekaran usaha pada saat / tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
- 15) Hadiah pada saat / tanggal dibuat dan ditandatangani akta.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah tersebut di atas, pada tempat terutangnya yaitu pada wilayah yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN MASALAH

Menurut Soejono Soekanto, memberikan batasan tentang metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah penyelidikan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian".¹

Sedangkan Soetrisno Hadi, penelitian atau research adalah "usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah".²

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka mencari keterangan-keterangan yang lebih dalam terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan tentang perpajakan bagi Yayasan oleh para pendiri dan pengurus yayasan terhadap para petugas pungut pajak.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum, dapat ditinjau dari segi dan sudut-sudut : sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta dari sudut disiplin ilmu.³

¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press., Jakarta 1984, hal. 6.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 4.

³ Bambang Waluyo, SH., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7-11.

Dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) karena bertujuan untuk menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, dan biasanya dalam penelitian demikian, peneliti sudah mempunyai data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Dari sudut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masalah sesuai dengan keadaan / fakta yang ada.

Sedangkan dari sudut tujuannya, penelitian ini adalah penelitian problem identification, karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya dicarikan suatu jalan keluar.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian yang deskriptif analitis, yaitu :

"Cara-cara prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, perusahaan, instansi, dan lain-lain), sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta abstrak pada saat sekarang".⁴

Dalam penelitian ini menampilkan beberapa Yayasan yang sudah terdaftar sesuai dengan yang tercantum dalam monografi fiskal Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Barat.

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah wilayah Semarang Barat, selain terdapat banyak Yayasan, Kantor Pelayanan Pajak

⁴ H. Hadari HM. Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 1992, hal. 42.

wilayah Semarang Barat diketahui sebagai KPP yang pertama dan tertua sehingga terdapat pajak-pajak Yayasan yang tertua.

D. TEKNIK PENENTUAN SAMPEL

Dalam hal ini yang menjadi sasaran sampel adalah Yayasan-yayasan yang ada di wilayah Semarang Barat yang sudah terdaftar dalam daftar monografi fiskal kantor pelayanan pajak (KPP) wilayah Semarang Barat. Sehingga dari sejumlah seratus tujuh belas Yayasan dijadikan sampel penelitian semua. Sehingga teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah absolut sampel / sensus.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk penulisan tesis ini diperoleh melalui primer dan data sekunder. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka data yang diidentifikasi meliputi :

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang berupa pengalaman praktek dan pendapat subyek penelitian tentang apresiasi perpajakan bagi yayasan.

Untuk memperoleh data primer tersebut, maka dilakukan wawancara difokuskan pengurus dan pendiri yayasan serta petugas pungut pajak.

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data pendukung guna menunjang data skunder.

2. Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi antara lain :
 - a. Badan Hukum Primer, Undang-undang baik Undang-Undang Perdata (KUH Per), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maupun undang-undang tentang yayasan, undang-undang tentang perpajakan.
 - b. Badan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Buku-buku hasil karya para sarjana
 - 2) Hasil-hasil penelitian
 - 3) Berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder yang terdiri dari :
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini

F. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif terhadap cara penyelesaian permasalahan yang dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode Analisis Normatif Kualitatif yaitu suatu cara menganalisa dan menemukan hubungan

antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada, yang menghasilkan data secara deskriptif kualitatif.⁵

Selain itu dipergunakan juga teknik analisa dokumenter yaitu

"Penelitian yang menghasilkan data-data dari bahan kepustakaan atau dokumen, yaitu apa yang diperoleh peneliti dari dokumen yang dipelajari dicatat dan dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang ada dalam dokumentasi dipelajari secara utuh".⁶

Mengingat penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif kemudian dikaitkan dengan asas-asas hukum yang berkembang dalam peraturan hukum itu sendiri. Dari hubungan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang telah disusun. Untuk selanjutnya akan sampailah pada suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dimunculkan.

⁵ Soerjono Sukanto dan Sri Munaji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 20.

⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres Jakarta, 1984, hal. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KEADAAN WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG BARAT

1. Kondisi Geografis

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat meliputi sebagian dari Kotamadya Semarang (meliputi 8 kecamatan) dan seluruh Kabupaten Kendal yang luas wilayah seluruhnya adalah 125.120 Ha. Adapun perincian wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kotamadya Semarang

- 1) Kecamatan Gajah Mungkur
- 2) Kecamatan Banyumanik
- 3) Kecamatan Ngalian
- 4) Kecamatan Semarang Utara
- 5) Kecamatan Semarang Barat
- 6) Kecamatan Gunung Pati
- 7) Kecamatan Mijen
- 8) Kecamatan Tugu

b. Kabupaten Kendal

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Kecamatan Boja | 5) Kecamatan Kaliwungu |
| 2) Kecamatan Brangsong | 6) Kecamatan Kangkung |
| 3) Kecamatan Cepiring | 7) Kecamatan Kendal |
| 4) Kecamatan Gemuh | 8) Kecamatan Limbangan |

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 9) Kecamatan Pageruyung | 15) Kecamatan Singorejo |
| 10) Kecamatan Patean | 16) Kecamatan Sukorejo |
| 11) Kecamatan Patebon | 17) Kecamatan Weleri |
| 12) Kecamatan Pegandon | |
| 13) Kecamatan Plantungan | |
| 14) Kecamatan Rowosari | |

Secara administratif wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Semarang Barat dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

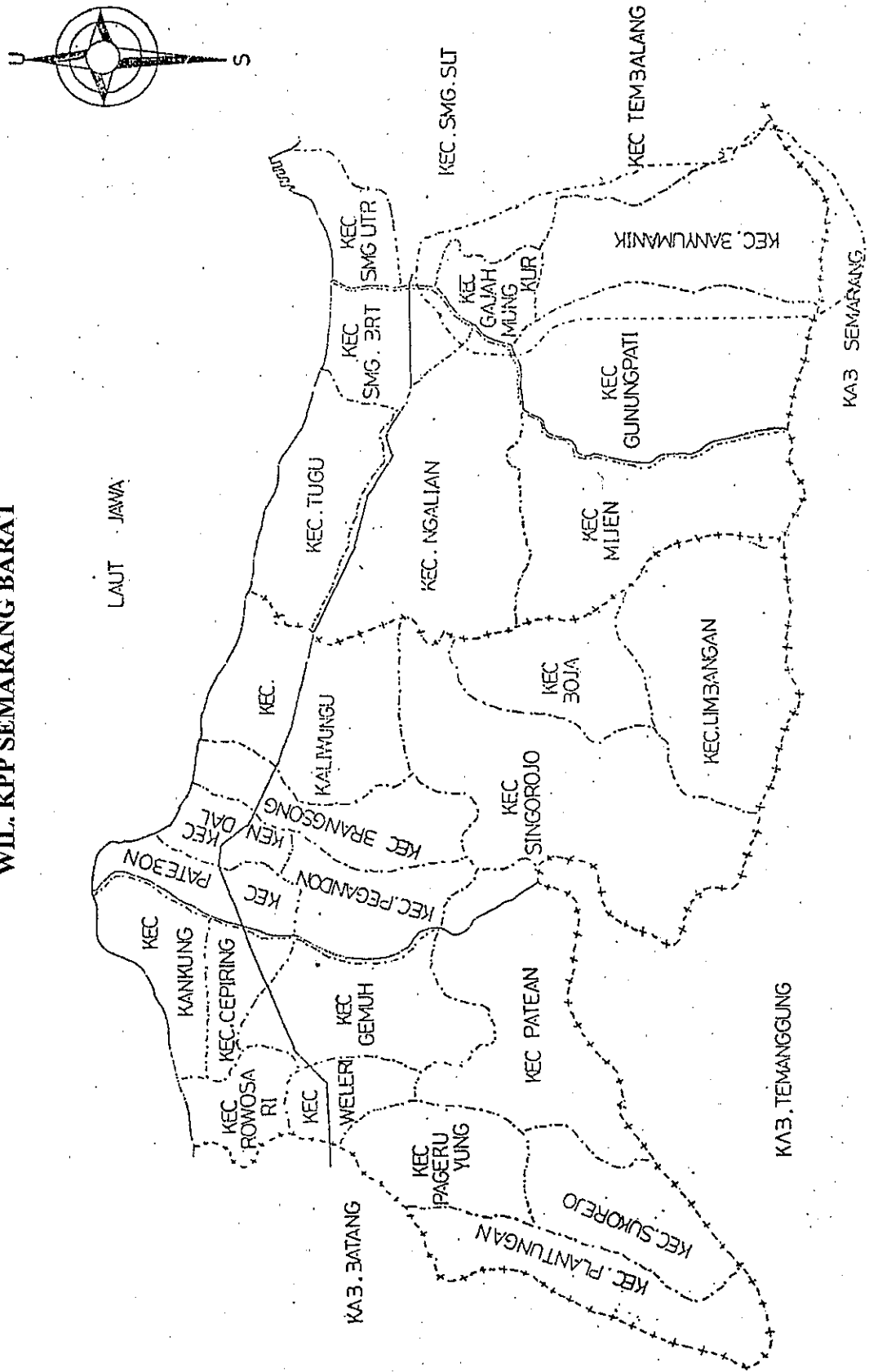
- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Kec. Semarang Selatan / Kec. Tembalang
- c. Sebelah selatan : Kab. Semarang / Kab. Temanggung
- d. Sebelah barat : Kab. Batang

Dengan adanya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka mulai tahun 2002 untuk Kecamatan Gajah Mungkur dan Kecamatan Banyumanik tidak termasuk wilayah kerja KPP Semarang Barat, tapi menjadi wilayah kerja KPP Semarang Selatan.

Sekilas tentang wilayah kerja KPP wilayah Semarang Barat dapat terlihat dalam peta sebagai berikut :

PETA KABUPATEN KENDAL DAN KODIA SEMARANG

WIL. KPP SEMARANG BARAT



2. Kondisi Demografi

Berdasarkan monografi fiskal yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat tahun 2002, jumlah penduduk wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat 8 Kecamatan Kodya Semarang dan Kabupaten Kendal berjumlah 1.523.203 orang dan 367.312 kepala keluarga.

Berdasarkan luas wilayah 125.120 Ha maka dapat diketahui rata-rata jumlah kepadatan penduduk sebesar 12,2 Ha. Keadaan penduduk yang bernaung dalam KPP Wilayah Semarang Barat yang tersebar dalam Kodya Semarang dan Kabupaten Kendal dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL I
LUAS DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK
KEADAAN TAHUN 2001

NO	DAERAH	LUAS (Ha)	Jumlah	
			Penduduk	KK
1	Kotamadya Semarang			
	1.1 Kec. Gajah Mungkur	1.078	57.550	12.399
	1.2 Banyumanik	2.773	104.578	24.687
	1.3 Ngaliyan	3.997	89.202	25.086
	1.4 Semarang Utara	1.097	122.736	27.633
	1.5 Semarang Barat	1.996	146.651	31.358
	1.6 Gunungpati	5.263	573485	15.335
	1.7 Mijen	5.755	37.927	8.927
	1.8 Tugu	2.938	24.145	5.271
	Kabupaten Kendal	100.223	882.929	216.616
	Jumlah	125.120	1.523.203	367.312
	Jumlah Tahun sebelumnya	125.011,87	1.466.083	327.792

Sumber : Monografi Fiskal, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat

3. Konsisi Sosial Ekonomi

Dalam melihat kondisi sosial ekonomi, maka perhatian kita terarah pada masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat di antaranya berhubungan dengan masalah pekerjaan.

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kotamadya Semarang sangat bervariasi, antara lain di Kecamatan Semarang Utara sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan dan buruh industri. Di Kecamatan Gunung Pati dan Mijen banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh industri. Sedang di Kecamatan Banyumanik banyak bermukim ABRI, PNS, dan pensiunan. Di Kabupaten Kendal mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Untuk lebih jelasnya maka kita perhatikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL II
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN PENDUDUK
KEADAAN TAHUN 2001

No Urt	Daerah	Pegawai		Jumlah		
		Negeri	Pensiunan	Angkutan	Pdg/Htl/Rest	Lain ²
1	2	3	4	5	6	7
1	Kotamadya Semarang					
	1.1 Kec. Gajahmungkur	9.776	4.344	1.528	2.395	15.773
	1.2 Kec. Banyumanik	13.896	7.683	3.605	3.039	57.335
	1.3 Kec. Ngalian	8.614	1.267	1.381	2.507	47.543
	1.4 Kec. Semarang Utara	3.867	2.064	1.725	6.873	59.933
	1.5 Kec. Semarang Barat	9.279	3.643	2.836	4.561	70.983
	1.6 Kec. Gunung Pati	1.380	260	506	1.317	33.566
	1.7 Kec. Mijen	836	527	463	761	15.352
	1.8 Kec. Tugu	507	135	128	1.015	13.074
2	Kabupaten Kendal	12.849	5.812	9.912	30.113	466.170
	Jumlah	61.004	25.735	22.084	52.581	779.729
	Jumlah Tahun sebelumnya	58.883	52.705	15.851	55.596	245.880

Sumber : Monografi Fiskal, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat

Sektor usaha yang masih dapat dikembangkan dan mempunyai potensi besar adalah industri mebel. Industri ini memproduksi barang-barang mebel seperti meja, kursi, almari, tempat tidur, dan peralatan dapur. Bahan baku utama adalah kayu yang mudah diperoleh karena dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat terdapat satu wilayah KPH di Kabupaten Kendal. Selain itu bahan baku kayu dapat didatangkan dari Pulau Kalimantan yang letak geografisnya dekat dengan Semarang. Industri mebel ini diharapkan dapat menghidupkan perekonomian yang ada di wilayah KPP Semarang Barat dengan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Dari data industri pengolahan jumlah Produk Domestik Regional Bruto tahun 2001 sebesar Rp. 1.705.755.000 yang diperkirakan terus meningkat pada tahun 2002 seiring dengan membaiknya keadaan perekonomian masyarakat.

Hasil industri ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah ekspor keluar negeri karena barang komoditi mebel Indonesia banyak diminati negara-negara Eropa, Jepang maupun Cina.

Secara garis besar proses produksi atau pembuatan komoditi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan bahan baku yang baik dan berumur tua.
- b. Kayu dioven agar dapat bertahan lama dan berkualitas lebih baik.
- c. Selanjutnya kayu dipotong sesuai dengan jenis barang yang akan diproduksi.
- d. Proses berikutnya adalah perakitan, pengamplasan dan finishing.

e. Barang jadi siap dijual di dalam negeri atau diekspor.

4. Gambaran Ekonomi Daerah dan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak KPP Semarang Barat untuk 8 tahun terakhir ini mempunyai angka peningkatan yang signifikan yaitu meningkat berkisar antara 8% sampai dengan 43%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 530.361.000,-. Penerimaan tersebut banyak didukung dari sektor industri, yaitu industri pengolahan, industri tekstil dan industri plastik yang mencapai jumlah Rp. 384.157.933.008,- atau 72,43% dari total penerimaan. Perhatikan tabel sebagai berikut :

TABEL III
PENERIMAAN PAJAK DAN PERTUMBUHANNYA
(JUTAAN RUPIAH)

No Urut	Tahun Anggaran	pph		PPN		Pajak Lainnya		Jumlah	
		Penerimaan	%	Penerimaan	%	Penerimaan	%	Penerimaan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1996/1997	59.207	11,11	142.776	17,11	859	(77,32)	202.842	113,32
2	1997/1998	84.187	42,19	157.625	10,40	806	(6,17)	242.618	119,61
3	1998/1999	126.376	50,11	157.474	(0,10)	907	12,53	284.757	117,37
4	1999/2000	165.240	30,75	207.584	31,82	1.162	28,11	373.986	131,34
5	2000	117.418	(28,94)	251.419	21,12	1.486	27,88	370.323	99,02
6	2001	229.687	95,61	297.703	18,44	2.881	93,87	530.361	143,22

% = Pertumbuhan dalam setiap tahun anggaran

Untuk pajak diambil dari P VI

(Penerimaan netto tidak termasuk restitusi dan Sph Kirim)

Di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat terdapat beberapa Kawasan Berikat, Kawasan Industri dan Perumahan / Real Estate yang cukup strategis dan berpotensi untuk menunjang penerimaan pajak. Kawasan Berikat yang ada yaitu : kawasan Berikat Bumi Semarang Baru, Kawasan Berikat Wijaya Kusuma, Kawasan Berikat Tanjung Mas. Kawasan Industri yang terdapat di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat sebagai berikut : Kawasan Industri Tambak Aji, Tugu Wijaya Kusuma, Candi Gatot Subroto, Tanjung Mas dan Bumi Semarang Baru. Sedangkan untuk perumahan / *Real Estate* yang masih dalam tahap pengembangan ada 9 perumahan / *Real Estate*.

Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat masih menjadi pusat penerimaan Wajib Pajak Bendaharawan untuk wilayah Kotamadya Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Hal ini merupakan salah satu potensi bagi KPP Semarang Barat untuk penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. penerimaan dari sektor ini pada tahun 2001 berjumlah Rp. 144,799 milyar (27,3 % dari penerimaan seluruhnya).

Dalam mengelola wilayah kerja dan penerimaan laba pada saat ini Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat melibatkan sejumlah pegawai dengan komposisi jabatan sebagaimana terlampir.

B. PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI YAYASAN

Undang-undang pajak disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan sesuai dengan prinsip keadilan, maka

wajib pajak yang setara kemampuan ekonominya harus memikul kewajiban pajak yang setara pula. Karena perkembangan kegiatan yayasan, maka dalam bidang perpajakan yayasan dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga atau unit kegiatan usaha lain yaitu Badan Hukum Yayasan dikenai ketentuan pajak negara yang berlaku, antar lain :

1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN / PPn BM)
3. Bea meterai
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Adapun yayasan yang terdaftar di bawah naungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Semarang Barat adalah sebagai berikut, daftar terlampir. Dari jumlah daftar nama yayasan tersebut yaitu sebanyak 117 Yayasan, digolongkan berdasarkan bidang usahanya sebagai berikut :

1. Yayasan yang bergerak di bidang jasa pendidikan sebanyak 96 buah.
2. Yayasan yang bergerak di bidang jasa penelitian dan pengembangan (Litbang) sebanyak 10 buah.
3. Yayasan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan sebanyak 7.
4. Yayasan yang bergerak di bidang jasa modal di luar panti sebanyak 1.
5. Yayasan yang bergerak di bidang jasa rumah sakit swasta sebanyak 3.

Berikut ini dijelaskan perlakuan perpajakan bagi yayasan menurut masing-masing ketentuan perpajakan yang berlaku :

1. Pajak penghasilan (PPh)

Kewajiban yayasan terhadap pajak penghasilan (PPh) dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Kewajiban Badan (Penghasilan Yayasan itu sendiri)

Untuk menghitung penghasilan kena pajak (penghasilan neto), yayasan diperkenankan mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan pajak adalah selisih lebih (keuntungan) antara penerimaan bruto sebagai obyek pajak dan pengeluaran-pengeluaran atau biaya termasuk pemberian subsidi kepada pihak yang kurang mampu. Sehingga dari aspek perpajakannya atas kekayaan yayasan tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Penghasilan yang bukan objek pajak, berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-34/PJ.4/1995 sebagai berikut :

- a) Bantuan atau sumbangan dan hibah sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang PPh ditambahkan dengan zakat yang diterima yayasan sebagai badan amil zakat.
- b) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
- c) Bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

2) Penghasilan yang menjadi objek pajak :

- a) Penghasilan sehubungan dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa yang dilahirkan oleh yayasan.
- b) Penghasilan berupa bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI.
- c) Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- d) Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta dan sumbangan, bantuan, atau hibah.
- e) Pembagian keuntungan dari kerjasama usaha.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 27 tahun 1996 jo. PP No. 79 tahun 1999 terhadap penghasilan yayasan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang nilainya lebih dari Rp. 60.000.000,- dikenai PPh final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Sedang untuk berinvestasi bagi yayasan maksimal hanya sebesar 25% dari seluruh kekayaan Yayasan. Hal ini agar kegiatan bisnis Yayasan tidak mengganggu kegiatan jalannya dan tidak semata-mata berorientasi laba.

Namun khusus untuk Yayasan pendidikan dan Yayasan kesehatan, Dirjen Pajak memberikan perlakuan khusus keuntungan yang diberikan bagi Yayasan diberikan pembebasan PPh dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Keuntungan tersebut harus dipergunakan untuk pembangunan gedung prasarana pendidikan dan kesehatan lainnya dalam jangka waktu 4 tahun berikutnya.
- 2) Memberitahukan rencana pengeluaran pembangunan kepada pihak KPP tempat Yayasan terdaftar dengan tembusan Dirjen Pendidikan Tinggi

dan/atau Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pendidikan dan departemen kesehatan.

- 3) Melampirkan surat pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan atau kesehatan.
- 4) Melakukan pencatatan tersendiri dan pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut dalam lampiran SPT Tahunan PPh.

Terhadap kewajiban Badan Hukum Yayasan berlaku ketentuan tarif sebagai berikut :

- Sampai dengan Rp. 50 juta = 10%
- Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta = 15%
- Di atas Rp. 100 juta = 30%

b. Kewajiban Yayasan sebagai Pemotong Pajak

Pemotongan wajib pajak PPh badan, yayasan wajib melakukan pemotongan / pemungutan pajak penghasilan yaitu PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 26. Kemudian menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dari jumlah yayasan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Semarang Barat yaitu sebanyak 117 yayasan, dalam hal tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajaknya sbagai berikut :

- 1) Pasal 25, sebanyak 8 yayasan dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.446.428.

2) Pasal 21/26, sebanyak 7 Yayasan dengan nilai nominal sebesar Rp. 41.394.917.

3) Pasal 23/25 sebanyak 0.

4) Pajak final sebanyak 0.

Jadi dari 117 buah yayasan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Semarang Barat hanya terdapat 15 buah yaysan yang tercantum melakukan pembayaran atau sebesar 12,8% nya dengan jumlah nominal pemasukan pajaknya sebesar 49.841.345.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan dalam hal membayar pajak badan bagi yayasan untuk wilayah ini sangat rendah.

2. pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPh BM)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kuno pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) di dalam daerah pabean atau atas impor barang kuno pajak pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN atau pengushaa yang selama 1 (satu) tahun belum melakukan penyerahan barang kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih Rp. 180.000.000,-.

Sedangkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan termasuk yayasan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usha perdagangan, melakukan usaha jasa, serta memanfaatkan barang tidak

berwujud dari luar daerah pabean dan atau jasa dari luar daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Negara RI yang didalamnya berlaku perundang-undangan pabean, yang meliputi : darat, perairan, lapisan udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Dengan konstruksi hukum yang demikian berarti PPN hanya dikenakan atas barang dan jasa yang tujuan konsumsinya adalah di dalam wilayah Negara RI.

Oleh karena Badan Hukum Yayasan yang melakukan penyerahan barang melebihi jumlah Rp. 360.000.000,- dan Rp. 180.000.000,- yaitu penyerahan jasa, maka Yayasan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sebagai PKP Yayasan wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan.

Pada dasarnya segala penyerahan dan atau impor BKP / JKP terutang PPN, namun terdapat beberapa jenis barang jasa yang tidak kena PPN, antara lain :

a. Jenis barang yang tidak kena PPN

- 1) Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya;
- 2) Barang hasil peternakan, perburuan / penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- 3) Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;

- 4) Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
 - 5) Barang-barang kebutuhan pokok;
 - 6) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
 - 7) Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
 - 8) Saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya;
 - 9) Air bersih yang disalurkan melalui pipa.
- b. Jenis jasa yang tidak kena PPN
- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - 2) Jasa di bidang pelayanan sosial;
 - 3) Jasa di bidang pengiriman surat;
 - 4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - 5) Jasa di bidang keagamaan;
 - 6) Jasa di bidang pendidikan;
 - 7) Jasa di bidang kesenian;
 - 8) Jasa di bidang penyiaran;
 - 9) Jasa di bidang angkutan umum;

Dasar pengenaan pajak PPN adalah jumlah harga jual, atau penggantian, atau nilai impor, atau nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Sedangkan tarif PPN dan PPh BM adalah sebagai berikut :

- a. Tarif pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen).
- c. Tarif PPh BM adalah 10%-50% sedangkan pengelompokan BKP yang tergolong mewah, yang dikenakan PPh BM ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan hibah bumi yang ada di bawahnya, sedang bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam/diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pada dasarnya semua bumi dan bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia bisa dimasukkan objek pajak PBB, kecuali :

- a. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, museum atau yang sejenisnya.
- c. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka dan taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.

Tarif PBB merupakan tarif tunggal dan berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (perumahan, perkantoran, industri, hotel, dan sebagainya) yaitu sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

Perhitungannya : $PBB = \text{tarif } (0,5\%) \times \text{NJKP } (20\%)$.

NJKP (Nilai jual kena pajak) merupakan dasar perhitungan PBB yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah yang besarnya serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dan nilai jual obyek pajak (NJOP).

Subjek pajak PBB adalah orang atau badan termasuk yayasan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan PBB atas rumah sakit swasta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diperlakukan khusus sebagai berikut:

a. Rumah Sakit Swasta

- 1) Rumah sakit swasta IPSM (Instansi Pelayanan Sosial Masyarakat) yaitu rumah sakit swasta yang 25% dijumlah tempat tidurnya digunakan untuk pasien yang tidak mampu dan SHU (sisa hasil usaha)nya digunakan untuk investasi rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit. Bagi rumah sakit jenis ini dikenakan PBB sebesar 50% dari jumlah PBB yang seharusnya terutang, sehingga rumus penghitungannya sebagai berikut :

$$PBB = 50\% \times 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP) \\ 0,05\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

- 2) Rumah sakit swasta yang bukan IPSM, dan didirikan oleh suatu badan yang berpihak PT dikenakan PBB secara penuh (100%).

b. Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Perguruan tinggi swasta yang sosial yang semata-mata melayani kepentingan umum di bidang pendidikan.

Pengenaan PBB atas PTS berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJG/1995 tanggal 24 Pebruari 1995 dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB atas PTS dilaksanakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun rata-rata \geq Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) satu tahun.
 - Luas bangunan $\geq 2.000 \text{ m}^2$.
 - Lantai / tingkat bangunan ≥ 4 lantai.
 - Luas tanah $\geq 20.000 \text{ m}^2$.
 - Jumlah mahasiswa ≥ 3.000 mahasiswa.
- 2) Pengenaan PBB-nya diberikan keringanan yaitu berupa dikenakan sebesar 50% dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- 3) Apabila PTS dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-nyata tidak memperoleh surplus / keuntungan, atau ada bukti-bukti lain yang dapat dipertimbangkan misalnya bencana alam, maka PTS tersebut dapat diberikan pengurangan atau pembatalan SPPT.

4. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Pihak yang terutang bea meterai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Besarnya tanpa bea meterai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. Tarif Bea Meterai Rp. 6.000 dikenakan atas dokumen :

- 1) a) Surat perjanjian/surat lain dengan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan dan keadaan yang bersifat perdata.
- b) Akta notaris termasuk salinannya
- c) Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkapnya
- d) Surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- e) Surat berharga seperti wesel, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- f) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 2) Dokumen yang akan digunakan dengan alat pembuktian di muka pengadilan :
 - a) Surat-surat biasa dan surat kerumahtanggaan.
 - b) Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk kajian lain / digunakan untuk orang lain, lain dari maksud semula.

b. Tarif Bea Meterai Rp. 3.000 dikenakan atas dokumen :

- 1) Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal antara Rp. 250.000 (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 2) Surat-surat berharga seperti : wesel, promes dan aksep dengan harga nominal antara Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 3) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya antara 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) samai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 4) Cek dengan bilyet giro dengan harga nominal berapapun.

Apabila suatu dokumen (kecuali cek dan bilyet giro) mempunyai nominal telah lebih dari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka atas dokumen tersebut tidak terutang Bea Meterai.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adlah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (dalam hal ini yayasan). Badan hukum yayasan diperlakukan sama dengan badan-badan yang lain atau orang pribadi.

Dasar hukum BPHTB adalah undang-undang N. 21 tahun 1997 juncto UU No. 20 tahun 2000. obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang meliputi :

- a. Pemindahan hak, karena : jual, beli, tukar menukar, hibah, wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan (badan hukum lainnya), pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang / pelaksanaan putusan hakim, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.
- b. Pemberian hak baru, karena : kelanjutan pelepasan hak, dan di luar pelepasan hak.

Pada umumnya bentuk perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek pajak (baik orang pribadi / badan) termasuk Yayasan adalah perbuatan yang terutang BPHTB, dengan pengecualian khusus bagi Yayasan sebagai berikut :

- a. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena wakaf.
- b. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Tarif pajak BPHTB adalah sebesar 5% (lima persen), cara menghitungnya :

BPHTB = Nilai perolehan objek pajak kena pajak x tarif.

$$= (NPOP - NPOPTKP) \times 5\%.$$

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOTKP) untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Semarang Barat (Kotamadya Semarang) adalah sebagai berikut :

– Jual beli = Rp. 20.000.000,-

- Waris / hibah / wasiat = Rp. 150.000.000,-

C. HAMBATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK YAYASAN

Setelah berlakunya ketentuan perundang-undangan Yayasan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, maka kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum semakin mantap yang semua menjadi bahan perbincangan baik mengenai status hukumnya, gerak usahanya maupun segi kemanfaatannya maka sekarang sudah tidak lagi.

Sebagai sebuah badan hukum, Yayasan tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama yang dimiliki oleh badan-badan yang lain termasuk dalam bidang perpajakan. Dalam hal tertentu oleh pemerintah Yayasan diberi perlakuan khusus yang memungkinkan diperolehnya keringanan dalam hal perpajakan oleh karena mempertimbangkan bahwa Yayasan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya berorientasi pada kepentingan umum, yaitu kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan, sehingga sudah cukup alasan bagi pemerintah untuk memberikan keistimewaan dalam hal perpajakan.

Namun demikian cukup disayangkan dalam hal tertentu segi penerimaan pajak dan Yayasan tidak cukup memuaskan kalau dibandingkan dengan data-data yang masuk sebagai subyek pajak Yayasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kendala rahasia bank

Sebagaimana diketahui bahwa bank memiliki aturan sendiri yang sangat ketat dimana tidak diperkenankan suatu bank tanpa adanya permintaan dari nasabah yang bersangkutan bisa membocorkan rekening nasabahnya

ke publik. Sebab jika dilakukan maka akan terkena sanksi yang berupa akan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat umum dan bisa dituntut secara pidana oleh para nasabah yang bersangkutan.

2. Ketidakterbukaan pembukuan Yayasan

Dalam hal pembukuan Yayasan terkadang tidak tertib administrasi, artinya Yayasan tidak melakukan pembukuan sebagaimana layaknya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sulit dilakukan tindakan yang tegas karena disebabkan tidak cukup alasan untuk melakukan penekanan terhadap sanksi perpajakan. Sementara kondisi yang sebenarnya dari aset Yayasan yang tersurat dalam administrasi pembukuan itu dijadikan patokan untuk menentukan bahwa Yayasan tersebut patut dikenai pajak-pajak tertentu.

3. Berlindung dibalik kepentingan umum

Dengan dalih kepentingan umum, maka Yayasan memperoleh kelonggaran dan keringanan dalam hal perpajakannya. Namun kenyataan dalam praktek di lapangan ia melakukan praktek-praktek komersial sehingga diperoleh keuntungan yang berlipat karena tidak harus membayar pajak yang seharusnya. Jadi kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan hanya dijadikan kedok untuk memperoleh keringanan dalam hal pajak-pajaknya.

Dengan demikian terjawab sudah beberapa permasalahan yang terkait dengan aspek-aspek yuridis fiskal Yayasan dan problematikanya dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun lapangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar di masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.
Walaupun digolongkan sebagai organisasi nirlaba Yayasan merupakan subyek pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk sebagai pemungut sebagian bagan yang lain, atau pemotongan pajak tertentu.
3. Kedudukannya sebagai subyek pajak menurut ketentuan perundang-undangan, maka Yayasan dikenakan pajak-pajak negara yang masih berlaku antara lain :
 - a. Pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM).
 - c. Bea meterai.
 - d. Pajak bumi dan bangunan (PBB).
 - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
4. Perlakuan perpajakan bagi Yayasan terhadap pajak negara tersebut dalam beberapa hal oleh pemerintah diberi keringanan. Hal ini disebabkan oleh karena bahwa Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang orientasi kegiatannya bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
5. Antusiasme pembayaran pajak Yayasan sangat rendah, hal ini terlihat dari jumlah Yayasan yang terdapat dalam monografi fiskal Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat bila dibandingkan dengan pendapatan penerimaan pajak Yayasan.
6. Secara umum penerimaan pajak Badan Hukum Yayasan di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat belum bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan, karena dijumpai beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat, di antaranya adalah :
- a. Kendala rahasia bank
 - b. Ketidakterbukaan pembukuan Yayasan
 - c. Alasan berlindung di balik kepentingan umum, oleh karena maksud dasar dan tujuan pendirian Yayasan memiliki kegiatan usaha di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang Yayasan sebagai organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa Yayasan dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai pemungutan dan pemotong pajak tertentu. Sehingga perlunya kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk membantu penyuluhan hukum di bidang perpajakan secara terakhir dan berkesinambungan.
3. Perlunya pendekatan dan kerjasama yang baik antara petugas pemungut pajak dengan para pengurus Yayasan sehingga segala bentuk kesulitan yang dihadapi dalam perpajakan Yayasan dapat teratasi dengan baik.
4. Perlunya usaha peningkatan pelayanan kepada para pengurus Yayasan agar mereka tidak merasa enggan untuk patuh membayar pajak-pajaknya termasuk tidak melakukan manipulasi yang harus dibayar dengan dalih kepentingan umum.
5. Perlunya kesadaran pada semua pihak tertentu dan pengurus Yayasan, bahwa pajak sangat dibutuhkan negara dalam rangka pembayaran

sehingga tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban karena kita telah menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara.

6. Perlunya peningkatan SDM (sumber daya manusia) bagi pihak-pihak yang terkait, baik para petugas maupun para pengurus Yayasan dalam bahwa pelatihan dan tugas belajar sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya sehingga penerima pajak dari Yayasan dapat diperoleh secara maksimal.

RINGKASAN

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka eksistensi Yayasan di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kokoh, setelah selama ini pendirian Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat, doktrin dan yurisprudensi.

Perkembangan dinamis yang terjadi baik di tingkat internasional maupun nasional telah menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan Yayasan sebagai organisasi nirlaba (*Not – for – profit organization*), dimana Yayasan yang selama ini dikelola secara konvensional atau tradisional kiranya perlu melakukan introspeksi dan pembenahan apabila ingin dapat service dan sukses menjalankan misinya dalam era reformasi yang menuntut adanya profesional, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan.

Adanya berbagai penafsiran yang keliru dalam pengelolaan Yayasan yang selama ini berlangsung seperti :

- Yayasan dianggap sebagai organisasi nirlaba yang sama sekali tidak boleh mencari keuntungan (*nonprofit oriented*) adanya pemikiran tersebut telah menyebabkan banyak Yayasan yang "lesu darah" karena dalam upaya pendanaan hanya mengandalkan "sumbangan" dari para donatur tanpa berusaha mencari sumber lain yang lebih kreatif. Lebih parah lagi bila para donatur yang diandalkan adalah orang atau badan yang sama dari tahun ke tahun yang dimintakan belas kasihannya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Karena Yayasan memiliki misi sosial, keagamaan dan kemanusiaan maka dapat dipahami bahwa manajemen Yayasan kurang profesional dibandingkan dengan manajemen bisnis yang bertujuan laba (*profit oriented*), karena para pendiri dan pengurusnya adalah para sukarelawan yang juga mempunyai banyak kesibukan lain, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Yayasan tidak setinggi yang diberikan oleh perusahaan karena karyawan Yayasan diberikan imbalan yang lebih rendah.
- Sebagai organisasi nirlaba, pengelolaan Yayasan dianggap berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Banyak Yayasan yang tidak berkembang karena dikelola dengan kurang profesional, tidak efisien, tidak adanya akuntabilitas publik, kurangnya pengawasan dan sebagainya.

Paradigma pengelolaan Yayasan yang berjalan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan yang maksimal agar supaya Yayasan dapat berkembang sehat mencapai maksudnya. Sehubungan dengan aspek perpajakan bagi Yayasan selama ini timbul berbagai kesalahpahaman, sebagai organisasi nirlaba, yaitu yayasan tidak membagikan laba atau keuntungan yang diperolehnya baik dalam bentuk deviden, bagian laba dan sejenisnya, karena Yayasan tidak mempunyai pemilik maupun anggota. Timbul berbagai anggapan bahwa Yayasan bebas pajak karena tujuan Yayasan adalah dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang semata-mata untuk kepentingan umum / kepentingan sosial.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Yayasan, bahwa Yayasan merupakan badan hukum, sebagai badan hukum Yayasan merupakan subyek pajak. Sebagai subyek pajak Yayasan akan dikenakan pajak-pajak negara yang

masih berlaku sebagaimana badan yang lain di antaranya adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Pendidikan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Perlakuan berbagai macam pajak negara tersebut, pada pajak tertentu diberikan fasilitas oleh negara dalam bentuk keringanan dalam membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, mengingat bahwa organisasi Yayasan berorientasi kegiatan pada kepentingan publik (umum) yaitu sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga negara berkepentingan untuk itu karena secara tidak langsung membantu pemerintah / negara dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana cita-cita negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dari dalam kenyataan di lapangan digambarkan bahwa perolehan pendapatan pajak badan Yayasan tidak diperoleh secara maksimal dari 117 buah jumlah Yayasan yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat diketahui hanya 15 buah (12,8%) yang bayar PPh badan dengan pendapatan Rp. 49.841.345 dengan perincian sebagai berikut :

Pasal 25 = 8 buah = 8.446.428

Pasal 4/26 = 7 buah = 41.394.917

Pasal 23/26 = 0

Final = 0

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan badan hukum Yayasan dalam kewajibannya membayar pajaknya itu rendah, hal ini disebabkan :

1. Kendala rahasia bank

2. Ketidakterbukaan pembukuan Yayasan
3. Alasan beralih demi kepentingan umum

Permasalahan yang menjadi kendala tersebut di atas yang dibayarkan menunjukkan bahwa kelemahan merupakan faktor kunci yang kiranya perlu dibenahi agar perolehan pajak Yayasan dapat diperoleh secara maksimal sehingga bisa membantu permasalahan negara dalam hal pendapatan negara dari sektor pajak yang pada akhirnya dapat membantu pembangunan negara yang sedang kita galakkan bersama.